

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)  
DI KPH PASURUAN BUKH LAWANG BARAT

# TESIS

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI KPH PASURUAN BUKH LAWANG BARAT

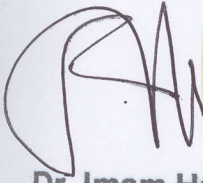
Untuk Memperoleh Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister

oleh :

**BUDIONO**  
NIM 0921101011

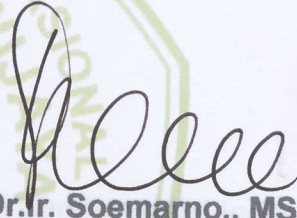
Dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal 7 Juli 2011  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Dr. Imam Hanafi.,S.Sos.,M.Si.

Ketua



Prof. Dr. Ir. Soemarno., MS.

Anggota

Anggota

Anggota

Malang,

Universitas Brawijaya  
Program Pascasarjana  
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS  
NIP 19550817 198003 1 003

MALANG  
2011

RINGKASAN

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Karya tulis ini saya susun atas bimbingan 2 dosen pembimbing saya

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang,

Mahasiswa,



Nama : Budiono

NIM : 0921101011

PS : PSLP

PPSUB

Kata kunci: Implementasi Kebijakan PHBM

## RINGKASAN

Budiono, 0921101011. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Juli 2011, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pangkuan Hutan (KPH) Pasuruan Komisi Pembimbing, Ketua: Imam Hanafi, Anggota: Soemarno.

Kerusakan hutan Indonesia mencapai 43 juta hektar, dan diperkirakan terus berkembang tiap tahun mencapai 1,6 s/d 2 juta hektar. Perhutani sebagai pengelola hutan di pulau Jawa dan Madura mengelola 2.831.500 hektar dari 3.157.000 hektar hutan yang ada dan kondisinya juga memprihatinkan. Di wilayah unit II, sejak pertengahan 1988 hingga Mei 2001 seluas 156 ribu hektar mengalami kerusakan dan gundul. Di KPH Pasuruan tersebut peningkatan lahan kosong dari luas yang ada di KPH Pasuruan. Desentralisasi, membuat Dewan Pengawas Perhutani selaku pengurus mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perhutani Nomor : 136/KPTS/ DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang mengatur pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis masyarakat, dengan adanya pemberdayaan dan peningkatan peran serta dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan. Implementasi PHBM mengandung resiko Policy Failure yang disebabkan oleh Bad Execution, yang faktor penyebabnya adalah implementator. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan Kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan hambatan/kendala implementasi dan kinerja implementasi dan kerja implementasi PHBM. Obyek penelitian yang di ambil adalah Perhutani KPH Pasuruan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam hal ini penulis mengambil sampel LMDH Indrokilo Manunggal yang berada di RPH Wonorejo. Adapun proses dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif dengan prosedur reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn, kinerja implementasi kebijakan PHBM di KPH Pasuruan adalah terimplementasi dengan baik. Penilaian dari segi proses dan hasil. Dari segi proses implementasi kebijakan PHBM di KPH Pasuruan adalah baik sebagai contoh meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan dan terwujudnya hutan yang aman dan lestari.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan PHBM

## SUMMARY

Budiono, 0921101011. Postgraduate Program Brawijaya University, Juli 2011, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pangkuan Hutan (KPH) Pasuruan. Supervisor: Imam Hanafi, Co-supervisor: Soemarno.

Indonesia's forest damage at 43 million hectares, and is expected to continue to grow each knowledge reached 1.6 to 2 million hectares. Perhutani as forest management on the regions of Java and Madura manages 2,831,500 ha of forest. In the region of unit II, since mid-1988 to May 2001 covering an area of 156 thousand hectares were damaged and bare. In the peningkata lahann KPH Pasuruan empty from wide on the KPH Pasuruan. Decentralization, making Perhutani As a Governing Board of Trustees issued a Decree of the Board of Trustees Perhutani Number: 136/ KPTS/ DIR/ 2001 About the Management of Forest Resources with the Community that govern the management of community-based forest resource, with the empowerment and increased participation and/ or interested parties in forest management. CBFM Implementation Policy Failur risks caused by Bad Execution, a contributing factor is the implementer. The goal of this research is to investigate the Joint Forest Management Policy Implementation Society (CBFM) in Perhutani Pemangkuan Unity Forest (KPH), Pasuruan.

The method used in this research is descriptive, qualitative approach. As the focus in this research is the policy with the Community Forest Management (CBFM) IN Perhutani office Pemangkuan Unity Forest (KPH) Pasuruan obstacles of implementation and working performance and the implementation of CBFM implementation. Object of research on take is Perhutani KPH Pasuruan through Forest Village Society Institute (LMDH). In this case the authors take a sample LMDH Indrokilo Manunggal sustainable in Wonorejo RPH. The process of collecting data used in this study were interviews, observation, and documentation. While the analysis used is an interactive model of data analysis with the reduction process, presentation and verification of data.

Based on the model of Van Meter and Van Horrn, the performance of the implementation of CBFM in KPH Pasuruan policy is implemented properly. Assessment in terms of process and outcome. In terms of policy implementation process at KPH Pasuruan CBFM is good as an example of the increased welfare Forest Village Society and the realization of a safe and sustainable forests.

Keywords: Policy Implementation CBFM